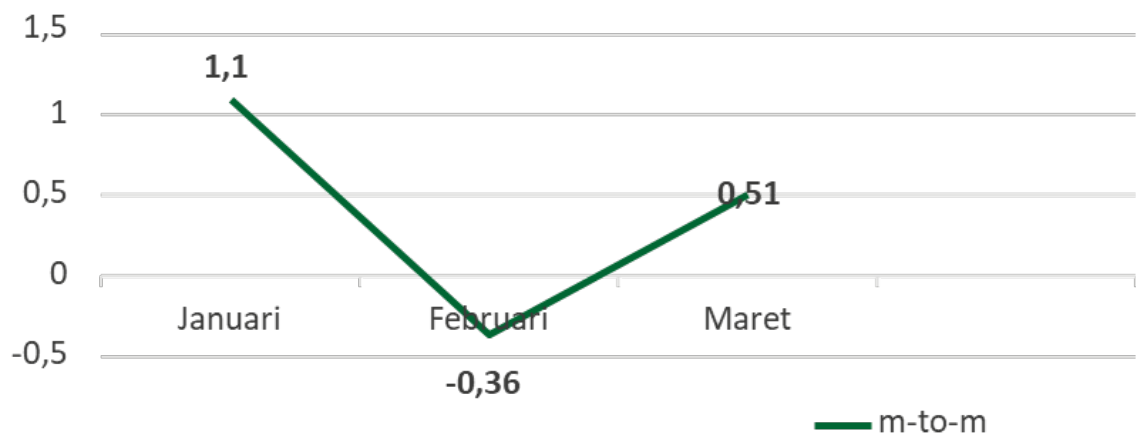


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

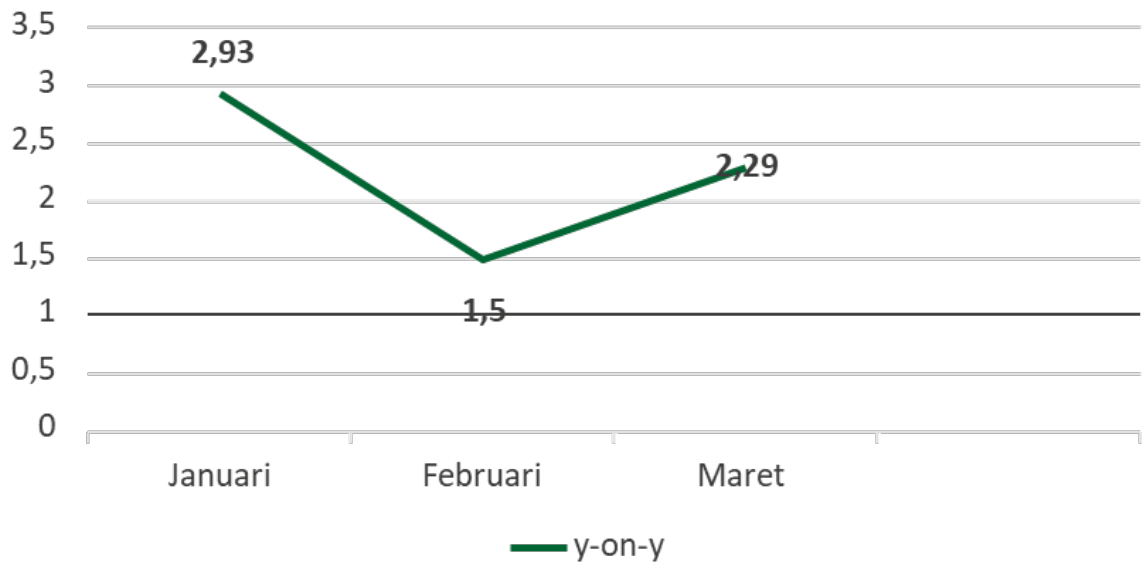
1. Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,91.
2. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada enam dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,90 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,22 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,78 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,57 persen
3. Secara month to month (m-to-m), Kabupaten Tanah Laut mengalami inflasi sebesar 0,51 persen pada bulan Maret 2024. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Tanah Laut bulan Maret 2024 adalah sebesar 1,24 persen.
4. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan dan hasil perhitungan BPS, pada Maret 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,29 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,56 pada Maret 2023 menjadi 104,91 pada Maret 2024. Secara month to month (m-to-m), Kabupaten Tanah Laut mengalami inflasi sebesar 0,51 persen pada bulan Maret 2024. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Tanah Laut bulan Maret 2024 adalah sebesar 1,24 persen.

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)



5.

Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)



6.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada enam dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,90 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,22 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,78 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,57 persen
2. Kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Laut khususnya pada sektor distribusi barang dan jasa masih bersifat penanganan jangka pendek seperti pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar.
3. Masih tergantungnya pasokan dari luar daerah dan luar pulau untuk beberapa produk pangan masih menjadi permasalahan dalam hal pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Tanah Laut

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, strategi pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dengan strategi 4K, yaitu menciptakan Keterjangkauan Harga, menjamin Ketersediaan Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Kebijakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Keterjangkauan Harga

- Mengalokasikan anggaran subsidi (dari dana insentif fiskal dan dana BTT);
 - b. Pelaksanaan kegiatan pasar murah di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau saat terjadi gejolak harga.
- 2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Melakukan Gerakan penanaman cabe dan padi
 - b. Optimalisasi penyuluhan pertanian
 - c. Alokasi Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)
 - d. Penyediaan data untuk pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dari pemerintah pusat
 - e. Subsidi Premi Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP)
- 3. Kelancaran Distribusi
 - a. Pelaksanaan program Layanan Angkutan untuk masyarakat secara gratis dari kecamatan Bati -Bati ke Ibu Kota Pelaihari dan antar kecamatan lainnya
 - b. Penganggaran untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten
 - c. Peningkatan jalan usaha tani
- 4. Komunikasi Efektif
 - a. Pembuatan spanduk himbauan untuk bijak berbelanja
 - b. Menyebarkan informasi harga barang melalui media radio pemerintah daerah
 - c. Pelaksanaan High Level Meeting TPID dan rapat teknis TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Operasi pasar merupakan hal yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan harga pada saat terjadi shock di daerahnya seperti yang dilaporkan beberapa TPID. Melihat pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operasi pasar yaitu:
 - 1. Sasaran individu yang berhak mendapatkan komoditas dari pelaksanaan operasi pasar merupakan individu yang tergolong tidak mampu dan harus diutamakan untuk mendapatkan hak karena mereka yang paling terbebani ketika terjadi kenaikan harga yang tinggi.
 - 2. Titik lokasi pelaksanaan operasi pasar, sebaiknya dilaksanakan secara tersebar dan bertempat di daerah paling terdampak
- B. Percepatan penggunaan BTT untuk pemberian subsidi ongkos angkut atau subsidi harga merupakan salah satu program yang tepat untuk mengatasi tingginya harga pada saat tertentu. Subsidi tersebut secara langsung mempengaruhi biaya perolehan barang, sehingga harga di level konsumen menjadi lebih rendah
- C. Komunikasi publik ke masyarakat dapat menjadi salah satu usaha TPID untuk melaksanakan pengendalian harga terutama dari sisi menjaga ekspektasi Masyarakat, salah satunya memanfaatkan pimpinan daerah dan tokoh agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengendalikan konsumsinya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Memperkuat data dan informasi terkait pasokan bahan pokok dan penting, terutama neraca pangan strategis
- B. optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar dan pelaksanaan pasar murah di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

Membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan

C.
tidur